

RENCANA KERJA

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
PROVINSI RIAU
TAHUN 2026**



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 38 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, menyebutkan bahwa rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2026;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);

10. Peraturan Gubernur Riau Nomor 36 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2026.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2026 dan dokumen lainnya yang mempunyai kedudukan yang strategis untuk menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V : PENUTUP

Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 28 November 2025

Plt. GUBERNUR RIAU,

TTD

S. F. HARIYANTO

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 28 November 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

TTD

SYAHRIAL ABDI

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025 NOMOR : 39

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

YAN DHARMADI, SH, MH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19840326 200903 1 003



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Riau Tahun 2026 disusun dengan mengacu kepada Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau 2025 - 2029, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2026 dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Riau memuat hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024, tujuan dan sasaran, Rencana Kerja dan Pendanaan pada Tahun 2026.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Riau Tahun 2026 ini dilakukan untuk mendukung pelaksanaan sebagian tugas Kepala Daerah yaitu pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas dan administrasi keuangan dan aset daerah dan juga untuk mendukung fungsi dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Riau selaku Bendahara Umum Daerah sekaligus sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang terkait dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Riau Tahun 2026 ini.

**PII. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU**



DAFTAR ISI

	Halaman
PERGUB PENETAPAN	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
 BAB I : PENDAHULUAN.....	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.3.1 Maksud	5
1.3.2 Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
 BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH	 8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra PD	8
2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.....	21
2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.....	21
2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan yang telah melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.....	24
2.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan.....	24
2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.....	25
2.1.6 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.....	25
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	38
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	40
2.4. Review terhadap RKPD	43
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	54
 BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	 57
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	57
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	59
3.3. Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	61
 BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	 74
 BAB V : PENUTUP.....	 89

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024.....	13
Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPKAD dan Pencapaian Renstra BPKAD Tahun 2024 s/d TW I Tahun 2025 Provinsi Riau.....	27
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BPKAD Provinsi Riau.....	39
Tabel 2.4 Pemetaan Permasalahan dan Akar Masalah	40
Tabel 2.5 Review Terhadap Ranwal RKPD Provinsi Riau Tahun 2026	44
Tabel 2.6 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan. Tahun 2026 Provinsi Riau	56
Tabel 3.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2026	60
Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027	65
Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) .	75

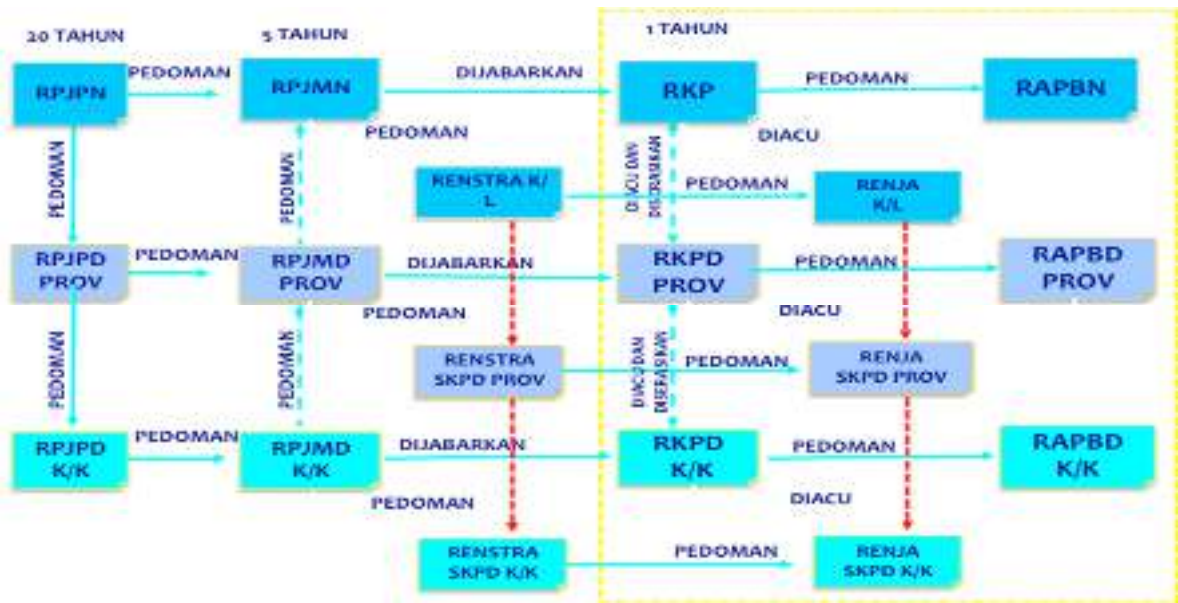
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau adalah Perangkat Daerah Provinsi Riau yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau yang disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Selaku Perangkat Daerah yang berbentuk Badan, BPKAD bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, dengan tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, Evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Bidang Anggaran Daerah dan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah serta menyelenggarakan kewenangan yang dilimpahkan Pemerintah kepada Gubernur sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan. Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen rencana yang memuat Program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Hubungan dan keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renja Perangkat Daerah dengan Renja K/L dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1
Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.



Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan daerah dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan. RPJM adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun yang merupakan penjabaran visi, misi, dan Program Kepala daerah yang memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, Program dalam rencana kerja yang bersifat indikatif. Pada Satuan Kerja, RPJM ini selanjutnya disebut dengan Rencana Strategis PD atau lebih dikenal dengan Renstra-PD. Rencana pembangunan 5 tahunan ini selanjutnya dijabarkan lagi dalam Rencana Pembangunan Tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja). Renja-PD merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 tahun. Renja-PD yang disusun dengan mengacu pada Renstra dan Pagu indikatif selanjutnya menjadi pedoman penyusunan RKA-PD. RKA inilah yang menjadi muara dari dokumen perencanaan dan pengAnggaran. Selanjutnya RKA-PD ini akan menjadi dasar ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Mempedomani Pasal 126 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Mengingat peran strategis dokumen Rencana Kerja PD dalam mendukung pelaksanaan Program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka penyusunan rencana kerja BPKAD Provinsi Riau Tahun 2024 dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pada Pasal 139 ayat (1), mengamanatkan bahwa Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (3) disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala BAPPEDA untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan RKPD paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan. Sehubungan dengan itu agar terlaksananya penyusunan dokumen Renja pada BPKAD

Provinsi Riau yang selaras dengan RKPD Provinsi Riau Tahun 2026, perlu dilakukan Penyusunan Renja BPKAD Provinsi Riau Tahun 2026.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2026 dilandasi oleh beberapa peraturan perundang-undangan, yang mengatur tentang sistem, mekanisme, proses dan prosedur tentang Rencana Strategis, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4238);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9) ;
15. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 5);

16. Peraturan Gubernur Riau Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2026-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 3);
17. Peraturan Gubernur Riau Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029.
18. Peraturan Gubernur Riau Nomor 36 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

a) Maksud

Rencana Kerja BPKAD Provinsi Riau Tahun 2026 disusun dengan maksud menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar wilayah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah serta sebagai pedoman bagi BPKAD Provinsi Riau dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Tahun 2026 melalui pelaksanaan Program, kegiatan dan sub kegiatan di Bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah :

1. Memberikan informasi tentang rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan pada tahun 2026;
2. Memandu konsistensi antara perumusan kebijakan pembangunan dan pelaksanaannya;
3. Memastikan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan Program, kegiatan dan sub kegiatan;

b) Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja BPKAD Provinsi Riau Tahun 2026 dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, Program, dan kegiatan serta indikator Kinerja BPKAD Provinsi Riau.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja BPKAD Provinsi Riau Tahun 2026 adalah:

1. Menjabarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BPKAD untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau.
2. Menjadi acuan kerja resmi bagi Perangkat Daerah serta pihak terkait dalam upaya Pembangunan dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau
3. Menjadi acuan resmi untuk penilaian Kinerja BPKAD Provinsi Riau Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, hubungan Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, serta sistematika penulisan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2026, yang terdiri dari:

- 1.1.Latar Belakang
- 1.2.Landasan Hukum
- 1.3.Maksud dan Tujuan
- 1.4.Sistematika Penulisan

BAB II: HASIL EVALUASI RENJA BPKAD PROVINSI RIAU TAHUN 2024

Bab ini memuat Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan capaian renstra perangkat daerah, analisa Kinerja pelayanan perangkat daerah, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap RKPD, penelaahan usulan Program dan kegiatan masyarakat dengan susunan bab sebagai berikut:

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra BPKAD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPKAD
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD
- 2.4. Review terhadap RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BPKAD

Bab ini berisi uraian ringkas tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran, serta program dan kegiatan perangkat daerah dengan susunan sebagai berikut :

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja BPKAD
- 3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPKAD

Bab ini berisi uraian ringkas tentang indikator kinerja dan kelompok sasaran pencapaian Renja Perangkat Daerah, pendanaan indikatif beserta sumber pendanaan dan prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif

BAB V.PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil Evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun 2025 dengan mengacu pada APBD Tahun Anggaran 2024 yang sudah disahkan. Evaluasi pelaksanaan rencana kerja bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauh mana komitmen, kemampuan dan hambatan dan permasalahan yang dihadapi PD dalam melaksanakan Program dan kegiatan, merealisasikan pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra PD yang didasarkan atas laporan hasil Evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya, dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPKAD Tahun 2023 dan/atau Realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, pada tahun 2024 Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau sebesar Rp. 1.955.138.068.823,35. Anggaran tersebut terdistribusi dalam Tiga (3) Program, Tiga Belas (14) Kegiatan dan Lima puluh empat (55) Sub Kegiatan

Secara umum kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 adalah :

1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- a) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKD

3) Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- e) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD

- f) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

7) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

- a) Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
- b) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
- c) Koordinasi Penyusunan dan verifikasi RKA-SKPD
- d) Koordinasi penyusunan dan verifikasi DPA-SKPD
- e) Koordinasi, penyusunan dan verifikasi perubahan DPA-SKPD
- f) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
- g) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
- h) Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
- i) Pembinaan Perencanaan Penganggaran daerah Pemerintah Provinsi

8) Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota

- a) Evaluasi Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota

- b) Evaluasi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota
- c) Evaluasi Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran ertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
- d) Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah
- e) Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
- f) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/ Kota dan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah

9) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

- a) Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
- b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
- c) Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
- d) Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan

10) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

- a) Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO, dan Beban
- b) Konsolidasi Laporan Keuangan PD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- c) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Peraturan

Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi

- d) Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
- e) Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
- f) Penyelenggaraan Akuntansi Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi

11) Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

- a) Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
- b) Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
- c) Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi

12) Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah

Daerah Lingkup Keuangan Daerah

- a) Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah

13) Pengelolaan Barang Milik Daerah

- a) Penyusunan Standar Harga
- b) Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
- c) Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik
- d) Inventarisasi Barang Milik Daerah
- e) Pengamanan Barang Milik Daerah
- f) Penilaian Barang Milik Daerah
- g) Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
- h) Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
- i) Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
- j) Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, pada tahun 2024 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau memperoleh Anggaran sebesar Rp 1.955.138.068.823,35. Anggaran tersebut terdistribusi dalam (3) Program dan (14) kegiatan dan 55 Sub Kegiatan yang dijalankan selama Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp. 1.753.256.895.531,00 atau 89,67%. Realisasi anggaran tertinggi sebesar 100%

yaitu Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Jika dilihat secara akumulasi menunjukkan hasil yang cukup baik terhadap realisasi anggaran BPKAD Provinsi Riau pada Tahun 2024. Bagaimana lebih jelasnya Realisasi Anggaran Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Realisasi Fisik dan Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	PROGRES KEUANGAN		REALISASI FISIK
			REALISASI SPJ		
			(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5=4/3*100	6
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	35.545.388.882,00	33.005.237.710,00	92,85	94,70
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.284.000,00	24.435.263,00	59,19	79,61
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	41.284.000,00	24.435.263,00	59,19	79,61
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25.023.719.534,00	23.412.609.236,00	93,56	93,56
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25.023.719.534,00	23.412.609.236,00	93,56	93,56
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	19.008.085,00	16.647.000,00	87,58	94,28
3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	19.008.085,00	16.647.000,00	87,58	94,28
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.675.521.948,00	2.173.929.264,00	81,25	92,90
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60.021.832,00	52.799.000,00	87,97	100,00
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	848.943.187,00	791.396.500,00	93,22	100,00

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	PROGRES KEUANGAN		REALISASI FISIK
			REALISASI SPJ		
			(Rp)	(%)	(%)
1	2	3	4	5=4/3*100	6
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	285.002.000,00	268.835.000,00	94,33	99,30
7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	543.523.929,00	497.910.059,00	91,61	99,92
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	938.031.000,00	562.988.705,00	60,02	80,00
V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.560.295.248,00	1.523.850.000,00	97,66	100,00
9	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.560.295.248,00	1.523.850.000,00	97,66	100,00
VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.802.540.067,00	4.604.405.275,00	95,87	99,32
10	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	35.000.000,00	30.426.000,00	86,93	87,30
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	846.819.290,00	783.661.946,00	92,54	97,50
12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.920.720.777,00	3.790.317.329,00	96,67	99,82
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.423.020.000,00	1.249.361.672,00	87,80	97,12
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	691.740.000,00	555.887.143,00	80,36	94,71

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	PROGRES KEUANGAN		REALISASI FISIK
			REALISASI SPJ		
			(Rp)	(%)	(%)
1	2	3	4	5=4/3*100	6
14	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	252.830.000,00	239.552.000,00	94,75	98,26
15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	478.450.000,00	453.922.529,00	94,87	100,00
B	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.917.011.217.976,35	1.718.679.433.516,00	89,65	89,72
VIII	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	3.908.278.690,00	3.028.122.966,00	77,48	86,51
16	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	237.211.500,00	192.845.808,00	81,30	86,32
17	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	203.932.750,00	127.215.200,00	62,38	68,45
18	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	67.235.000,00	44.445.200,00	66,10	73,20
19	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	32.537.095,00	12.804.420,00	39,35	40,07
20	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	37.434.935,00	22.667.656,00	60,55	64,69
21	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	78.507.665,00	39.356.415,00	50,13	53,88
22	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1.218.725.500,00	934.611.932,00	76,69	88,44

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	PROGRES KEUANGAN		REALISASI FISIK
			REALISASI SPJ		
			(Rp)	(%)	(%)
1	2	3	4	5=4/3*100	6
23	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1.137.037.500,00	965.933.319,00	84,95	94,97
24	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	293.146.500,00	162.372.489,00	55,39	65,25
25	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	602.510.245,00	525.870.527,00	87,28	92,77
IX	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	1.018.715.231,00	936.538.552,00	91,93	100,00
26	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	365.598.150,00	336.957.582,00	92,17	100,00
27	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	316.145.510,00	311.206.044,00	98,44	100,00
28	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	100.228.000,00	93.403.851,00	93,19	100,00
29	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	104.575.571,00	96.087.211,00	91,88	100,00
30	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	132.168.000,00	98.883.864,00	74,82	100,00

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	PROGRES KEUANGAN		REALISASI FISIK
			REALISASI SPJ		
			(Rp)	(%)	(%)
1	2	3	4	5=4/3*100	6
31	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.115.747.755,00	634.206.825,00	56,84	82,73
32	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	244.655.760,00	152.973.909,00	62,53	83,80
33	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga(PFK)	202.522.000,00	128.283.668,00	63,34	91,98
34	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	202.692.000,00	133.226.419,00	65,73	83,25
35	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	267.519.995,00	125.533.822,00	46,93	81,29
36	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	198.358.000,00	94.189.007,00	47,48	73,38
XI	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	994.440.668,00	852.463.792,00	85,72	95,79
37	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	68.668.330,00	58.607.348,00	85,35	92,30

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	PROGRES KEUANGAN		REALISASI FISIK
			REALISASI SPJ		
			(Rp)	(%)	(%)
1	2	3	4	5=4/3*100	6
38	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	248.211.168,00	223.171.554,00	89,91	100,00
39	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	370.078.125,00	336.060.196,00	90,81	98,88
40	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	171.383.295,00	123.143.883,00	71,85	81,14
41	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	136.099.750,00	111.480.811,00	81,91	99,93
XII	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.909.079.450.634,35	1.712.696.342.620,00	89,71	89,72
42	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	434.616.362.000,00	385.238.314.760,00	88,64	88,68
43	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	15.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
44	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	1.459.463.088.634,35	1.327.458.027.860,00	90,96	90,96
XIII	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	894.584.998,00	531.758.761,00	59,44	77,32
45	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	894.584.998,00	531.758.761,00	59,44	77,32

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	PROGRES KEUANGAN		REALISASI FISIK
			REALISASI SPJ		
			(Rp)	(%)	(%)
1	2	3	4	5=4/3*100	6
C	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2.581.461.965,00	1.572.224.305,00	60,90	68,65
XIV	Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.581.461.965,00	1.572.224.305,00	60,90	68,65
46	Penyusunan Standar Harga	269.942.000,00	263.571.630,00	97,64	100,00
47	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	110.099.030,00	86.968.871,00	78,99	94,77
48	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Inventarisasi Barang Milik Daerah	264.620.145,00	108.266.100,00	40,91	55,99
50	Pengamanan Barang Milik Daerah	975.961.710,00	566.706.492,00	58,07	62,06
51	Penilaian Barang Milik Daerah	427.665.000,00	150.006.800,00	35,08	44,88
52	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	17.761.905,00	14.805.000,00	83,35	100,00
53	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	341.630.000,00	251.681.967,00	73,67	81,81
54	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	90.639.050,00	55.645.990,00	61,39	79,09

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	PROGRES KEUANGAN		REALISASI FISIK
			REALISASI SPJ		
			(Rp)	(%)	(%)
1	2	3	4	5=4/3*100	6
55	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	83.143.125,00	74.571.455,00	89,69	100,00
TOTAL		1.955.138.068.823,35	1.753.256.895.531,00	89,67	89,78

2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target Kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Sesuai dengan tabel 2.2 diatas dari 3 Program, 17 Kegiatan dan 55 Subkegiatan ada 1 Sub kegiatan yang tidak memenuhi target Kinerja yaitu Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target Kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Sesuai dengan tabel 2.2 diatas dari 3 Program, 17 Kegiatan dan 55 Subkegiatan, ada 54 sub kegiatan yang telah memenuhi target Kinerja yang direncanakan yaitu :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada PD
3. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
9. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
10. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
11. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
12. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
13. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
14. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
15. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

16. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
17. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
18. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
19. Koordinasi Penyusunan dan verifikasi RKA-SKPD
20. Koordinasi penyusunan dan verifikasi DPA-SKPD
21. Koordinasi, penyusunan dan verifikasi perubahan DPA-SKPD
22. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
23. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
24. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
25. Pembinaan Perencanaan Penganggaran daerah Pemerintah Provinsi
26. Evaluasi Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota
27. Evaluasi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota
28. Evaluasi Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
29. Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah
30. Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

31. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/ Kota dan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah
32. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
33. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
34. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
35. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
36. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
37. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO, dan Beban
38. Konsolidasi Laporan Keuangan PD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
39. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi
40. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
41. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional
42. Penyelenggaraan Akuntansi Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi
43. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
44. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak

45. Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi
46. Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
47. Penyusunan Standar Harga
48. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
49. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Inventarisasi Barang Milik Daerah
50. Pengamanan Barang Milik Daerah
51. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
52. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
53. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
54. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

2.1.3 Realisasi Program/ Kegiatan yang melebihi target Kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Sesuai dengan penjelasan diatas dari dari 3 Program, 17 Kegiatan dan 55 Subkegiatan, ada 1 Sub kegiatan yang tidak tercapai target Kinerja, 54 Sub kegiatan yang telah tercapai memenuhi target Kinerja dan tidak ada Sub kegiatan yang melebihi target Kinerja.

2.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target Kinerja Program/ Kegiatan

Berdasarkan Tabel 2.2 diatas dapat diketahui bahwa secara umum Program dan kegiatan yang belum dapat mencapai target secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain Efektifitas pelaksanaan kegiatan masih belum optimal, yang disebabkan masih terbatasnya kualitas Sumber Daya Aparatur yang memiliki pola pikir simultan, kreatif dan inovatif terhadap penyusunan perencanaan Anggaran, Program kegiatan, pelaksanaan, penatausahaan sampai dengan penyusunan laporan keuangan.

Namun demikian terdapat juga beberapa kegiatan yang telah mencapai target bahkan dapat melampaui target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

- a) Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan;
- b) Adanya komitmen bersama antara Tim Pelaksana Kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditanda tangani;
- c) Adanya koordinasi yang baik dengan instansi terkait.

2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian Program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi yang ditimbulkan dengan tidak tercapainya target Program dan kegiatan akan mempengaruhi capaian indikator Kinerja yang telah dituangkan dalam Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau, sehingga berdampak lambatnya pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah. Memperhatikan kondisi tersebut, kebijakan yang diambil oleh BPKAD Provinsi Riau untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan kegiatan yang tepat sasaran dan penjadwalan ulang pelaksanaan kegiatan;
- b. Melakukan efisiensi penggunaan Anggaran;
- c. Memprioritaskan kegiatan yang strategis guna mendukung capaian tujuan sasaran Kinerja perangkat daerah;
- d. Penetapan target indikator Kinerja yang lebih terukur;
- e. Melakukan monitoring dan Evaluasi kegiatan yang dilaksanakan secara berkala.

2.1.6 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Beberapa kebijakan/tindakan perencanaan :

- 1. Melakukan Penyesuaian APBD Tahun 2024 berupa Pergeseran Anggaran
- 2. Perencanaan kegiatan yang tepat sasaran dan penjadwalan ulang pelaksanaan kegiatan dan melakukan efisiensi Anggaran.

3. Memprioritaskan kegiatan yang strategis guna mendukung capaian tujuan sasaran Kinerja perangkat daerah serta Melakukan monitoring dan Evaluasi kegiatan yang dilaksanakan secara berkala
4. Melakukan Perbaikan Regulasi/Peraturan Gubernur yang berkaitan dengan Percepatan Penyaluran Bantuan Keuangan dan Pemulihan Ekonomi.
5. Pengaturan Manajemen Kas Daerah dengan Prioritas Belanja Mendesak.

Penyediaan Anggaran BPKAD Provinsi Riau diarahkan dalam rangka pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis yaitu : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dan Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah, diketahui bahwa mayoritas target pencapaian sasaran Kinerja BPKAD Tahun 2024 dapat dicapai.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPKAD Tahun 2024 dan Pelaksanaan Renja BPKAD sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 serta Pencapaian Renstra BPKAD dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPKAD dan
Pencapaian Renstra BPKAD 2024 s/d TW I Tahun 2025
Provinsi Riau.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran sub kegiatan tahun lalu			Target Renja PD tahun 2024	Perkiraan Realisasi capaian terget Renstra PD sampai dengan tahun berjalan		Unit Penanggung Jawab
					Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025 (TW I)	tingkat capaian Realisasi target Renstra (%) (TW I)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
5.02	KEUANGAN										
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%							
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya penyusunan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran dan dokumen evaluasi kinerja	100%	100%							
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			-	-	-	3 Dokumen	2 Dokumen	66 %	SEKRETARIAT
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%							
5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			136 ASN	136 ASN	100%	136 ASN	136	100 %	SEKRETARIAT
5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	100%	100%							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran sub kegiatan tahun lalu			Target Renja PD tahun 2024	Perkiraan Realisasi capaian target Renstra PD sampai dengan tahun berjalan		Unit Penanggung Jawab
					Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025 (TW I)	tingkat capaian Realisasi target Renstra (%) (TW I)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
5.02.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada PD	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah			2 Laporan	2 Laporan	100 %	2 Laporan	1 Laporan	50%	SEKRETARIAT
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%							
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	0 Paket	0%	SEKRETARIAT
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	100 %	1 Paket	1 paket	100%	SEKRETARIAT
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	0.5 paket	50%	SEKRETARIAT
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	0 Paket	0 %	SEKRETARIAT
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	0,10 Laporan	10%	SEKRETARIAT
5.02.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Dukungan Informasi SPBE di bidang keuangan			46,96 %	46,96 %	46,96 %	46,96 %	-	-	SEKRETARIAT
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	100%							
5.02.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			24 Unit	24 unit	100%	24 Unit	20 unit	83.33 %	SEKRETARIAT

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran sub kegiatan tahun lalu			Target Renja PD tahun 2024	Perkiraan Realisasi capaian target Renstra PD sampai dengan tahun berjalan		Unit Penanggung Jawab
					Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025 (TW I)	tingkat capaian Realisasi target Renstra (%) (TW I)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kinerja Aparatur	100%	100%							
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang dikirim			610 surat	610 surat	100%	610 surat	150 Surat	24,59 %	SEKRETARIAT
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Yang Dibayar			28 rekening	28 rekening	100%	28 rekening	12 Rekening	42.86 %	SEKRETARIAT
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	0 Laporan	0 %	SEKRETARIAT
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah									
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			21 Unit	21 Unit	100%	21 Unit	10 Unit	47.61%	SEKRETARIAT
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			50 Unit	50 Unit	100%	50 Unit	25	50 %	SEKRETARIAT
5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	0 Unit	0 %	SEKRETARIAT
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Keuangan Daerah Yang Dikelola	100%	100%							
5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Penetapan KUA, PPAS, Perubahan KUA, Perubahan PPAS, Perda tentang APBD, PerKDH tentang Penjabaran APBD, Perda tentang Perubahan APBD, PerKDH tentang Perubahan Penjabaran APBD.	100%	100%							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran sub kegiatan tahun lalu			Target Renja PD tahun 2024	Perkiraan Realisasi capaian target Renstra PD sampai dengan tahun berjalan		Unit Penanggung Jawab
					Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025 (TW I)	tingkat capaian Realisasi target Renstra (%) (TW I)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
5.02.02.1.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Penyusunan KUA - PPAS APBD dan KUPA - PPAS			12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	0 Dokumen	0 %	BIDANG ANGGARAN DAERAH
5.02.02.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun			4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	0 Dokumen	0 %	BIDANG ANGGARAN DAERAH
5.02.02.1.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi			33 Dokumen	33 Dokumen	100%	33 Dokumen	0 Dokumen	0 %	BIDANG ANGGARAN DAERAH
5.02.02.1.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi			33 Dokumen	33 Dokumen	100%	33 Dokumen	0 Dokumen	0 %	BIDANG ANGGARAN DAERAH
5.02.02.1.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi			33 Dokumen	33 Dokumen	100%	33 Dokumen	33 Dokumen	100%	BIDANG ANGGARAN DAERAH
5.02.02.1.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi			132 Dokumen	132 Dokumen	100%	132 Dokumen	0 Dokumen	0 %	BIDANG ANGGARAN DAERAH
5.02.02.1.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Penyusunan Perda dan Penyusunan Per KDH			10 Dokumen	10 Dokumen	100%	10 Dokumen	4 Dokumen	40 %	BIDANG ANGGARAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran sub kegiatan tahun lalu			Target Renja PD tahun 2024	Perkiraan Realisasi capaian target Renstra PD sampai dengan tahun berjalan		Unit Penanggung Jawab
					Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025 (TW I)	tingkat capaian Realisasi target Renstra (%) (TW I)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
5.02.02.1.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Penyusunan Perda dan Penyusunan Per KDH			10 Dokumen	10 Dokumen	100 %	10 Dokumen	0 Dokumen	0 %	BIDANG ANGGARAN DAERAH
5.02.02.1.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran			2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	2 Dokumen	1 Dokumen	50 %	BIDANG ANGGARAN DAERAH
5.02.02.1.01.13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi			220 Orang	220 Orang	100 %	220 Orang	0 Orang	0 %	BIDANG ANGGARAN DAERAH
5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%							
5.02.02.1.02.02	Evaluasi Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota			12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100 %	BIDANG ANGGARAN DAERAH
5.02.02.1.02.03	Evaluasi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota			12 Laporan	12 Laporan	100 %	12 Laporan	0 Laporan	0 %	BIDANG ANGGARAN DAERAH
5.02.02.1.02.04	Evaluasi Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			12 Laporan	12 Laporan	100 %	12 Laporan	0 Laporan	0 %	Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran sub kegiatan tahun lalu			Target Renja PD tahun 2024	Perkiraan Realisasi capaian target Renstra PD sampai dengan tahun berjalan		Unit Penanggung Jawab
					Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025 (TW I)	tingkat capaian Realisasi target Renstra (%) (TW I)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
	Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota									
5.02.02.1.02.06	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan			3 Laporan	3 Laporan	100 %	3 Laporan	0 Laporan	0 %	Bidang Akuntansi dan Pelaporan
5.02.02.1.02.10	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			12 Laporan	12 Laporan	100 %	12 Laporan	6 Dokumen	50%	Bidang Akuntansi dan Pelaporan
5.02.02.1.02.12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah			2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	2 Dokumen	0 Dokumen	0 %	Bidang Akuntansi dan Pelaporan
5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya koordinasi Perbendaharaan daerah	100%	100%							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran sub kegiatan tahun lalu			Target Renja PD tahun 2024	Perkiraan Realisasi capaian target Renstra PD sampai dengan tahun berjalan		Unit Penanggung Jawab
					Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025 (TW I)	tingkat capaian Realisasi target Renstra (%) (TW I)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
5.02.02.1.03.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah			1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0 Dokumen	0 %	Bidang Perben dan Kasda
5.02.02.1.03.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)			2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	1 Laporan	50%	Bidang Perben dan Kasda
5.02.02.1.03.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait			12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	0 Laporan	0 %	Bidang Perben dan Kasda
5.02.02.1.03.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan			1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0 Dokumen	0 %	Bidang Perben dan Kasda

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran sub kegiatan tahun lalu			Target Renja PD tahun 2024	Perkiraan Realisasi capaian target Renstra PD sampai dengan tahun berjalan		Unit Penanggung Jawab
					Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025 (TW I)	tingkat capaian Realisasi target Renstra (%) (TW I)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
5.02.02.1.03.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan			80 Orang	80 Orang	100 %	80 Orang	0 Orang	0 %	Bidang Perben dan Kasda
5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100%	100%							
5.02.02.1.04.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban			432 Dokumen	432 Dokumen	100%	432 Dokumen	144 Dokumen	33.33 %	Bidang Akuntansi dan Pelaporan
5.02.02.1.04.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi			14 Laporan	14 Laporan	100%	14 Laporan	7 Laporan	50 %	Bidang Akuntansi dan Pelaporan
5.02.02.1.04.05	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi			2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	0 Dokumen	0 %	Bidang Akuntansi dan Pelaporan
5.02.02.1.04.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah			1 Dokumen	1 Dokumen	100%	-	-	-	Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran sub kegiatan tahun lalu			Target Renja PD tahun 2024	Perkiraan Realisasi capaian target Renstra PD sampai dengan tahun berjalan		Unit Penanggung Jawab
					Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025 (TW I)	tingkat capaian Realisasi target Renstra (%) (TW I)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
05.02.02.1.04.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah			1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0 Dokumen	0 %	Bidang Akuntansi dan Pelaporan
5.02.02.1.04.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi			33 Orang	33 Orang	100 %	33 Orang	6 Orang	15,57 %	Bidang Akuntansi dan Pelaporan
5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Alokasi dan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus	100%	100%							
5.02.02.1.05.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan			1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100 %	SEKRETARIAT
5.02.02.1.05.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	SEKRETARIAT
5.02.02.1.05.10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi			1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	SEKRETARIAT
5.02.02.1.06	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran sub kegiatan tahun lalu			Target Renja PD tahun 2024	Perkiraan Realisasi capaian target Renstra PD sampai dengan tahun berjalan		Unit Penanggung Jawab
					Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025 (TW I)	tingkat capaian Realisasi target Renstra (%) (TW I)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
5.02.02.1.06.02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah			1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0 Dokumen	0 %	SEKRETARIAT
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Barang Milik Daerah Yang Dikelola	100%	100%							
5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksanannya Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	100%							
5.02.03.1.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun			1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	0 Dokumen	0 %	Bidang PBMD
5.02.03.1.01.03	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah			2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	2 Dokumen	0 Dokumen	0 %	Bidang PBMD
5.02.03.1.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah			2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	2 Dokumen	0 Dokumen	0 %	Bidang PBMD
5.02.03.1.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah			7 Laporan	7 Laporan	100 %	7 Laporan	0 Dokumen	0 %	Bidang PBMD
5.02.03.1.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah			1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	0 Laporan	0 %	Bidang PBMD
5.02.03.1.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah			1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	0 Laporan	0 %	Bidang PBMD
5.02.03.1.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan			1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	0 Laporan	0 %	Bidang PBMD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran sub kegiatan tahun lalu			Target Renja PD tahun 2024	Perkiraan Realisasi capaian target Renstra PD sampai dengan tahun berjalan		Unit Penanggung Jawab
					Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025 (TW I)	tingkat capaian Realisasi target Renstra (%) (TW I)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
		Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah									
5.02.03.1.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	2 Dokumen	0 Laporan	0 %	Bidang PBMD
5.02.03.1.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			2 Laporan	2 Laporan	100 %	2 Laporan	0 Laporan	0 %	Bidang PBMD
5.02.03.1.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun			7 Laporan	7 Laporan	100 %	7 Laporan	0 Laporan	0 %	Bidang PBMD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau serta Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau bahwa BPKAD Provinsi Riau mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi:

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan Kesekretariatan, Bidang Anggaran Daerah, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Bidang Akuntansidan Pelaporan, dan Bidang Pengelolaan Barang MilikDaerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis pada Sekretariat, Bidang Anggaran Daerah, Bidang Perbendaharaan danKas Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan, dan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas dukungan teknis Kesekretariatan, Bidang Anggaran Daerah, Bidang Perbendaharaan dan KasDaerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan, dan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
4. pelaksanaan pembinaan teknis penyelenggaraanfungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah padaKesekretariatan, Bidang Anggaran Daerah, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan, dan Bidang Pengelolaan Barang MilikDaerah;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi di atas, sasaran yang ingin dicapai BPKAD Provinsi Riau adalah melalui Peningkatan Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau serta Peningkatan Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah Kabupaten/Kota. Ada 7 Indikator yang digunakan untuk mengukur Kinerja BPKAD Provinsi Riau sebagaimana terdapat dalam dokumen Renstra BPKAD Provinsi Riau yaitu:

- a) Ketepatan waktu penyusunan RAPBD Provinsi Riau.
- b) Ketepatan waktu penetapan APBD Provinsi Riau.

- c) Rata-rata waktu pemrosesan SPM.
- d) Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- e) Persentase aset tanah, gedung serta bangunan yang telah diinventarisasi.
- f) Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil Evaluasi Ranperda APBD.
- g) Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil Evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban APBD.

Capaian Kinerja Pelayanan BPKAD Provinsi Riau dengan yang telah ditetapkan di dalam Renstra disajikan pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BPKAD
Provinsi Riau

NO	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 0	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1	Ketepatan waktu penyusunan RAPBD Provinsi Riau	n/a	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	
2	Ketepatan waktu penetapan APBD Provinsi Riau	n/a	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	
3	Rata-rata waktu pemrosesan SPM	n/a	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	
4	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
5	Persentase aset tanah, gedung serta bangunan yang telah diinventarisasi	11 %	14,76%	15,84%	15,84%	15,84%	12,34%	12,34%	15,84%	15,84%	
6.	Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda APBD	91,66 %	91,66%	100%	100%	100%	91.67%	100 %	100%	100%	
7.	Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban APBD	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Berdasarkan Tabel 2.3 diatas dapat kita lihat dari 7 Indikator Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BPKAD Provinsi Riau Ada 6 Indikator Kinerja yang telah tercapai sesuai yang ditargetkan, dan Ada satu indikator Kinerja yang masih belum mencapai Target Kinerja yaitu Persentase aset tanah, gedung serta bangunan yang telah diinventarisasi, Capaian Indikator Kinerja dari bangunan yang telah diinventarisasi pada Tahun 2024 adalah sebesar 77.90 % dengan realisasi 12.34% dari 15.84% yang target dengan rincian yaitu dari 1.003 Aset Tanah dan 8.083 Gedung yang ada, terdapat 472 Aset Tanah dan 558 Aset Gedung yang sudah diinventarisasi.

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam rangka pencapaian target Kinerja BPKAD Provinsi Riau tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi yang berdampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah. Oleh karena itu diharapkan BPKAD Provinsi Riau dapat menyelesaikan tantangan tersebut dengan meningkatkan Kinerja melalui peluang-peluang yang ada dalam mencapai tujuan organisasi. Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam menghadapi isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsinya BPKAD Provinsi Riau yaitu dengan Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh BPKAD Provinsi Riau dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4
Pemetaan Permasalahan dan Akar Masalah

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau yang belum Optimal	Perubahan regulasi yang berubah dengan dinamis dan cepat;	Sesuai dengan kemajuan teknologi informasi, regulasi yang ada masih belum optimal
		Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua;	Sistem informasi pemerintah daerah belum optimal dalam penerapan akuntansi berbasis akrual
		Kecepatan dan ketepatan layanan perbendaharaan dan pengelolaan kas daerah;	Keterbatasan sarana dan prasarana pada layanan perbendaharaan dan pengelolaan kas daerah
		Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)	Belum seluruh tahapan siklus pengelolaan keuangan terimplementasi dengan baik dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)
2	Kualitas Kinerja SDM Pengelola Keuangan Belum Optimal	Tidak seimbangnya rasio antara jumlah pegawai dengan sarana prasarana yang tersedia	Peningkatan jumlah pegawai tidak diiringi dengan peningkatan sarana dan prasarana
		Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola Keuangan belum tersertifikasi	Minimnya pelatihan dan kesempatan untuk sertifikasi Pengelola Keuangan Daerah

Sumber : Renstra 2025 – 2029

Permasalahan sebagaimana tersebut di atas telah diidentifikasi pada dokumen Renstra BPKAD Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029. Permasalahan – permasalahan tersebut telah dianalisis secara mendalam dan menghasilkan rumusan kebijakan yang terdiri atas tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang akan diimplementasikan ke dalam Program dan kegiatan selama lima tahun sampai dengan akhir periode Renstra yaitu pada tahun 2030.

Dampak yang ditimbulkan dari permasalahan BPKAD Provinsi Riau adalah tidak optimalnya pencapaian Misi Kepala Daerah yang ke lima yaitu **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berintegritas serta pelayanan public yang berkualitas dengan dukungan aparatur yang kompeten dan professional menuju World Class Government”**. yang bertujuan Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel dengan sasaran:

- a) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau.
- b) Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- c) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Untuk mengatasi permasalahan – permasalahan yang dihadapi diatas BPKAD Provinsi Riau akan meminimalisir tantangan – tantangan dan memaksimalkan peluang – peluang dalam Pelayanan Perangkat Daerah. Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan asset daerah antara lain :

- a) Perubahan regulasi yang berubah dengan dinamis dan cepat, khususnya terkait dengan Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b) Belum Efektifnya Operasional Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang masih terkendala pada Modul Penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan daerah;
- c) Kecepatan dan ketepatan layanan perbendaharaan dan pengelolaan kas daerah;
- d) Keterbatasan sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi teknis pengelolaan keuangan dan aset;
- e) Belum optimalnya pengendalian intern dalam rangka peningkatan akuntabilitas maupun mencegah terjadinya kecurangan (*Fraud*) dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
- f) Tidak seimbangnya rasio antara jumlah pegawai dengan sarana prasarana yang tersedia.

Sesuai jabaran tantangan – tantangan diatas untuk meminimalisasi permasalahan BPKAD Provinsi Riau perlu memanfaatkan peluang – peluang semaksimalnya, antara lain :

- a) Reformasi birokrasi pelayanan publik yang diarahkan untuk mempercepat perwujudan pola pikir dan orientasi birokrasi dari dilayani menjadi melayani masyarakat, mempercepat perwujudan birokrasi yang efisien, kreatif, inovatif, bertanggungjawab, dan profesional, meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi pelayanan prima serta mendorong partisipasi masyarakat untuk merumuskan Program dan kebijakan layanan publik.
- b) Peningkatan kualitas, kompetensi dan kapasitas SDM pada bidang layanan di BPKAD Provinsi Riau.
- c) Ketersediaan Tenaga Informasi Teknologi (IT) yang dimiliki oleh BPKAD Provinsi Riau sudah sesuai dengan kompetensi sehingga mampu mendukung penerapan layanan secara terintegrasi.
- d) Ketersediaan Anggaran belanja pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan gedung kantor.
- e) Ketersediaan aplikasi pengelolaan keuangan sesuai dengan prinsip pengendalian intern seperti system e-katalog, e- purchasing, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan pelaksanaan transaksi secara non tunai.
- f) Jumlah ASN yang berpendidikan Sarjana Strata 1 dan Strata 2.

Dalam upaya mengatasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi serta memanfaatkan peluang sebagaimana diuraikan di atas, BPKAD Provinsi Riau menyusun Program - Program yang akan dilaksanakan pada Rencana Kerja Tahunan yaitu:

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- 3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Program-Program tersebut didukung oleh kegiatan- kegiatan dan sub-sub kegiatan dengan tujuan untuk mendorong pencapaian Kinerja, mencapai Kinerja organisasi sebagai bagian dari perwujudan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

2.4 Review terhadap RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini pada dasarnya adalah Rencana Tahunan bersifat rinci dan operasional yang disusun sebagai jabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RKPD ini selanjutnya dijadikan pula sebagai dasar utama dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Tahapan penyusunan rencana kerja ini melalui proses penyandingan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Penjelasan mengenai analisa kebutuhan rencana kerja perangkat daerah tersebut dilakukan apabila adanya temuan-temuan rencana kerja perangkat daerah yang tidak sesuai dengan RKPD, misalnya terdapat rumusan Program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di RKPD, atau Program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda. Adapun kondisi yang ditemukan pada RKPD Provinsi Riau Tahun 2026 dengan membandingkannya dengan analisis kebutuhan BPKAD Provinsi Riau dapat dirumuskan sebagai berikut

- a) Antara RKPD Provinsi Riau Tahun 2026 dan analisis kebutuhan BPKAD Provinsi Riau tidak terdapat rumusan Program dan kegiatan baru;
- b) Pagu perangkat daerah dan sebarannya pada tiap – tiap kegiatan sebagaimana terdapat pada RKPD tidak ada yang bertambah pada analisis kebutuhan perangkat daerah.
- c) Beberapa kegiatan pada RKPD ada koreksi target Kinerja pada analisis kebutuhan BPKAD Provinsi Riau dan disesuaikan dengan jumlah Anggaran yang akan dilaksanakan.

Table 2.6 menyajikan Review RKPD Tahun 2026 dengan Analisis Kebutuhan Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.5
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Riau Tahun 2026

Perangkat Daerah : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode					RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				1,444,238,142,232.42	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			1,444,238,142,232.42	-
5	02				KEUANGAN				1,444,238,142,232.42	KEUANGAN			1,444,238,142,232.42	-
5	02	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	30,827,606,446.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		100%	30,827,606,446.00	-
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terpenuhinya Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3 Dokumen	0	-
5	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	3 Dokumen	0	-
5	02	001	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	27,942,619,367.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	27,942,619,367.00	-
5	02	001	1.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Jumlah ASN	136 ASN	27,942,619,367.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	136 ASN	27,942,619,367.00	-
5	02	001	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terlaksananya Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 Laporan	7,461,185.00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		2 Laporan	7,461,185.00	-
5	02	001	1.03	006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada PD	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	7,461,185.00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada PD	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	2 Laporan	7,461,185.00	-
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100%		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%		
5	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	1 Paket	0	

Kode					RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
5	02	001	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	717,907,770.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	717,907,770.00	-
5	02	001	1.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25,808,800.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	1 Paket	25,808,800.00	-
5	02	001	1.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	224,083,235.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	1 Paket	224,083,235.00	-
5	02	001	1.05	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	96,852,000.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	1 Paket	96,852,000.00	-
5	02	001	1.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	215,101,735.00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	1 Paket	215,101,735.00	-
5	02	001	1.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	156,062,000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	1 Laporan	156,062,000.00	-
5	02	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	0	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	2 Dokumen	0	-
5	02	001	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	24 Unit	50,400,000.00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		24 Unit	50,400,000.00	-
5	02	001	1.07	010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	24 Unit	50,400,000.00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	24 Unit	50,400,000.00	-
5	02	001	1.08		Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Meningkatnya Kinerja Aparatur	100%	1,626,458,124.00	Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	1,626,458,124.00	-
5	02	001	1.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	15,460,000.00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	1 Laporan	15,460,000.00	-

Kode					RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
5	02	001	1.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	849,998,978.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	1 Laporan	849,998,978.00	-
5	02	001	1.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	760,999,146.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	100%	760,999,146.00	-
5	02	001	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	482,760,000.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	482,760,000.00	-
5	02	001	1.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	340,100,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	21 Unit	340,100,000.00	-
5	02	001	1.09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	65,410,000.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	50 Unit	65,410,000.00	-
5	02	001	1.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	77,250,000.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	3 Unit	77,250,000.00	-
5	02	002			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Persentase Keuangan Daerah Yang Dikelola	100%	1,412,399,159,786,.42	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		100%	1,412,399,159,786,.42	-
5	02	002	1.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Penetapan KUA, PPAS, Perubahan KUA, Perubahan PPAS, Perda tentang APBD, PerKDH tentang Penjabaran APBD, Perda tentang Perubahan APBD, PerKDH tentang Perubahan Penjabaran APBD.	100%	2,298,472,400.00	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		100%	2,298,472,400.00	-
5	02	002	1.01	001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	4 Dokumen	87,012,000.00	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	4 Dokumen	87,012,000.00	-

Kode					RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
5	02	02	1.001	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Jumlah dokumen perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	4 Dokumen	87,012,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	4 Dokumen	87,012,000.00	-
5	02	02	1.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	33 Dokumen	0	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	33 Dokumen	0	-
5	02	02	1.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	33 Dokumen	0	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	33 Dokumen	0	-
5	02	02	1.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	33 Dokumen	0	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	33 Dokumen	0	-
5	02	02	1.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	132 Dokumen	0	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	132 Dokumen	0	-
5	02	02	1.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	10 dokumen	674,234,400.00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	10 dokumen	674,234,400.00	-
5	02	002	1.01	008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	10 Dokumen	951,264,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	10 Dokumen	951,264,000.00	-
5	02	002	1.01	009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	6 Dokumen	89,066,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	6 Dokumen	89,066,000.00	-

Kode					RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
5	02	02	1.01	13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	220 Orang	409,884,000.00	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	220 Orang	409,884,000.00	-
5	02	002	1.02		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	100%	318,548,350.00	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota		100%	318,548,350.00	-
5	02	002	1.02	002	Evaluasi Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	12 Laporan	138.350.000	Evaluasi Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	12 Laporan	138,350.000	-
5	02	002	1.02	003	Evaluasi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	12 Laporan	134.450.000.00	Evaluasi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	12 Laporan	134.450.000.00	-
5	02	002	1.02	004	Evaluasi Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	12 Laporan	22,972,000.00	Evaluasi Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	12 Laporan	22,972,000.00	-
5	02	02	1.02	06	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	3 Laporan	0	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	3 Laporan	0	-

Kode					RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
5	02	002	1.02	010	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	12 Dokumen	22,776,350.00	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	12 Dokumen	22,776,350.00	-
5	02	02	1.02	12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/ Kota dan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	2 Dokumen	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/ Kota dan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	0	-
5	02	002	1.03		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Terlaksananya koordinasi Perbendaharaan daerah	100%	69,173,600.00	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		100%	69,173,600.00	-
5	02	002	1.03	001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 Dokumen	24,818,000.00	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	1 Dokumen	24,818,000.00	-
5	02	02	1.03	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	2 Laporan	4,800,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	2 Laporan	4,800,000.00	-
5	02	002	1.03	009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dokumen	12,045,600.00	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	12 Dokumen	12,045,600.00	-

Kode					RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
5	02	02	1.03	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	27,510,000.00	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	1 Dokumen	27,510,000.00	-
5	02	02	1.03	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	80 Orang	0	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	80 Orang	0	
5	02	002	1.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100%	190,009,944.00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		100%	190,009,944.00	-
5	02	002	1.04	002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO, dan Beban	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO, dan Beban	432 Dokumen	15,703,053.00	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO, dan Beban	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	432 Dokumen	15,703,053.00	-
5	02	002	1.04	004	Konsolidasi Laporan Keuangan PD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	14 Laporan	38,988,356.00	Konsolidasi Laporan Keuangan PD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	14 Laporan	38,988,356.00	-
5	02	002	1.04	005	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Jumlah Ranperda dan ranpergub tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun	2 Dokumen	104,364,975.00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	2 Dokumen	104,364,975.00	-
5	02	002	1.04	007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen	0	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	1 Dokumen	0	-

Kode					RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
5	02	002	1.04	009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	23,141,260.00	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	1 Dokumen	23,141,260.00	-
5	02	002	1.04	011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	33 Orang	7,812,300.00	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	33 Orang	7,812,300.00	-
5	02	002	1.05		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase Alokasi dan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus	1 Laporan	1,409,520,205,492.42	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		1 Laporan	1,409,520,205,492.42	-
5	02	002	1.05	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Jumlah Laporan Penatausahaan dan EvaluasiTerlaksananya pembayaran Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota	1 Laporan	175.131.394,000.00	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	1 Laporan	175.131.394,000.00	-
5	02	002	1.05	09	Pengel olaan Dana Darurat dan Mendesak	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Jumlah Laporan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	20,000,000,000.00	Pengel olaan Dana Darurat dan Mendesak	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	1 Laporan	20,000,000,000.00	-
5	02	002	1.05	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	1 Laporan	1,214,388,811,492.42	Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	1 Laporan	1,214,388,811,492.42	-
5	02	002	1.06		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		Terlaksananya Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	100%	2,750,000.00	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		100%	2,750,000.00	-
5	02	02	1.06	025	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	2,750,000.00	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	1 Dokumen	2,750,000.00	-

Kode					RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	100%	827,376,000.00	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		100%	827,376,000.00	-
5	02	03	1,01		Pengelolaan Barang Milik Daerah		Terlaksanannya Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	827,376,000.00	Pengelolaan Barang Milik Daerah		100%	827,376,000.00	
5	02	03	1,01	01	Penyusunan Standar Harga	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	171,316,000.00	Penyusunan Standar Harga	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	1 Dokumen	171,316,000.00	-
5	02	03	1,01	03	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	48,600,000.00	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	2 Dokumen	48,600,000.00	-
5	02	03	1,01	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah,	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	2,100,000.00	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah,	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	1 Dokumen	2,100,000.00	-
5	02	03	1,01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	7 Laporan	27,588,000.00	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	7 Laporan	27,588,000.00	-
5	02	03	1,01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	493.415,000.00	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	1 Laporan	493.415,000.00	-
5	02	03	1,01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	224,987,000.00	Penilaian Barang Milik Daerah	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	1 Laporan	224,987,000.00	-
5	02	03	1,01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan		Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	1 Laporan		-

Kode					RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
5	02	03	1.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2 Dokumen		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	2 Dokumen		-
5	02	03	1.01	11	Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 Laporan	23,070,000.00	Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	2 Laporan	23,070,000.00	-
5	02	03	1.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	7 Laporan	20,300,000.00	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	7 Laporan	20,300,000.00	-
TOTAL									1,444,238,142,232.42				1,444,238,142,232.42	-

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau menyelenggarakan rangkaian pengelolaan keuangan daerah selain sebagai Perangkat Daerah juga melaksanakan tugas dan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD). Fungsi yang erat kaitannya dengan usulan Program dan kegiatan masyarakat adalah pengelolaan keuangan berupa sub kegiatan belanja Bantuan Keuangan, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga sesuai dengan Permendagri 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Pasal 56 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, kelompok belanja transfer dirinci atas jenis:

- a. Belanja Bagi Hasil; dan
- b. Belanja Bantuan Keuangan

Mengacu pada Pasal 66 dan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Transfer diatur sebagai berikut:

- a. Belanja transfer diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek.
- b. Belanja transfer dianggarkan oleh PD yang membidangi keuangan daerah.
- c. Belanja Bagi Hasil,
 - 1. Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - 2. Belanja bagi hasil dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Belanja Bantuan Keuangan
 - 1. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
 - 2. Belanja bantuan keuangan dalam rangka tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.

3. Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Bantuan keuangan terdiri atas :
 - a) bantuan keuangan antar-Daerah provinsi;
 - b) bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota;
 - c) bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
 - d) bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau
 - e) bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
5. Bantuan keuangan bersifat umum atau khusus.
 - a) Bantuan keuangan bersifat umum peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan.
 - b) Bantuan keuangan bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.
 - c) Dalam hal pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah selaku pemberi bantuan keuangan, pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan kepada pemerintah daerah pemberi keuangan khusus.
 - d) Pemerintah daerah pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau Anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.

Proses perencanaan dan penganggaran untuk penyaluran bantuan keuangan, Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak, dan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi di kab/kota Provinsi Riau di mulai dari tahapan usulan masyarakat dan stakeholder terkait pada Musrenbang Kab/Kota selanjutnya usulan tersebut diusulkan ke Provinsi Riau melalui Bappeda Provinsi Riau. Kemudian pada tahapan musrenbang Provinsi Riau usulan Program/Kegiatan/SubKegiatan yang akan di anggarkan melalui mekanisme bantuan keuangan di bahas Bersama Stakeholder terkait seperti DPRD Provinsi Riau, Instansi Vertikal, Tokoh Masyarakat dan Organisasi terkait Lainnya, setelah dilakukan pembahasan maka usulan tersebut di urutkan menurut skala prioritas.

Sebelum pengesahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2026 usulan tersebut dilakukan pembahasan pada rapat tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Sesuai dengan Pasal 56 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang belanja Bantuan Keuangan dan Dana Bagi Hasil, dan Pasal 66, Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang belanja transfer termasuk belanja Darurat dan mendesak, berikut adalah usulan Program kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat.

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan.
Tahun 2026 Provinsi Riau

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator	Besaran/Volume	Catatan Penting
1.	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab./Kota Provinsi Riau	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Dokumen	-
2.	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab./Kota Provinsi Riau	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Dokumen	-
3.	Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	Kab./Kota Provinsi Riau	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	1 Dokumen	-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan dokumen Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2026, Pemerintah menyusun arsitektur kebijakan fiskal yang bersifat antisipatif, responsif, dan pragmatis, namun tetap fokus pada tercapainya tujuan jangka panjang. Kebijakan fiskal telah menjalankan perannya sebagai instrumen utama proses pemulihan ekonomi, khususnya di tahun 2026. Kebijakan fiskal memang harus terus merespon secara cepat dan tepat dinamika perekonomian yang masih dibayangi ketidakpastian yang tinggi. Di saat yang sama, kebijakan fiskal juga harus menjadi instrumen bagi reformasi struktural untuk penguatan daya saing dan produktivitas.

Tema kebijakan fiskal tahun 2026 adalah "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan." yang konsisten dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Tema kebijakan fiskal tahun 2026 ini Kebijakan fiskal tahun 2026 di sektor APBN akan dirancang untuk mampu merespon dinamika perekonomian domestik dan global, sekaligus menjawab tantangan dan mendukung pencapaian target pembangunan secara optimal.

Kebijakan fiskal tahun 2026 akan ditempuh melalui optimalisasi tiga fungsi utama APBN, yaitu alokasi, distribusi dan stabilisasi. Fungsi alokasi diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi melalui; peningkatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, perbaikan kelembagaan dan regulasi, serta mendorong agar aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi SDA. Fungsi stabilisasi diperkuat dengan mengoptimalkan peran APBN sebagai *shock absorber* untuk mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat, sehingga dapat menjadi fondasi yang kuat bagi penguatan resiliensi serta akselerasi pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, fungsi distribusi diarahkan untuk mendukung berbagai program afirmasi dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi 0% dan penurunan *stunting* ke 14% pada tahun 2026.

Untuk mendukung efektivitas dalam mengakselerasi transformasi ekonomi diperlukan penguatan reformasi fiskal secara holistik. Langkah tersebut diambil melalui optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan usaha, serta kelestarian lingkungan; konsisten melakukan upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja negara (*spending better*) untuk

menstimulasi perekonomian dan peningkatan kesejahteraan; serta mendorong pembiayaan yang inovatif, pruden, dan berkelanjutan.

Pemerintah mendorong optimalisasi pendapatan negara tahun 2026 dengan tetap menjaga iklim investasi serta kelestarian lingkungan. Pendapatan negara diperkirakan mencapai kisaran 12,14 % hingga 12,36 % dari PDB. Hal ini ditempuh antara lain dengan menjaga efektivitas pelaksanaan reformasi perpajakan (UU HPP) melalui perbaikan sistem perpajakan yang lebih sehat dan adil, perluasan basis pajak, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak. Efektivitas pelaksanaan reformasi perpajakan secara menyeluruh diharapkan dapat meningkatkan rasio perpajakan. Insentif fiskal untuk mendukung transformasi ekonomi diberikan secara terarah dan terukur. Sementara itu, optimalisasi PNBPD dilakukan melalui peningkatan inovasi layanan publik serta mendorong reformasi pengelolaan aset negara.

Belanja negara diarahkan untuk peningkatan kualitas belanja agar efisien dan efektif untuk menstimulasi perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Belanja negara diarahkan untuk percepatan transformasi ekonomi, dalam jangka pendek ditempuh melalui penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan *stunting*, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi. Sementara jangka menengah diarahkan untuk penguatan reformasi struktural melalui penguatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, mendorong aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi SDA dan penguatan kelembagaan dan regulasi. Pada sisi lain juga terus mendorong kebijakan subsidi dan program perlindungan sosial yang tepat sasaran dan efektif melalui peningkatan akurasi data, perbaikan mekanisme penyaluran, dan sinergi program. Penguatan sinergi dan harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah juga terus dilakukan agar pencapaian target pembangunan nasional dapat dicapai lebih efisien dan efektif. Untuk itu, belanja negara tahun 2026 akan berada pada rentang antara 14,59% hingga 15,18% dari PDB.

Dalam upaya menjaga keselarasan Program pembangunan, maka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah harus memperhatikan kebijakan fiskal dan strategi pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah pada tahun 2026. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau yang menjalankan fungsi sebagai Pengelola Keuangan Daerah sekaligus bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah, mengarahkan Program dan kegiatan untuk pencapaian tujuan dan sasaran melalui strategi pengendalian belanja pemerintah

daerah agar lebih efisien, efektif, lebih produktif dan menghasilkan *multiplier effect* terhadap perekonomian daerah, sebagaimana diarahkan dalam strategi kebijakan ekonomi makro tahun 2026.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun mendatang, dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Perumusan tujuan strategis yang baik adalah apabila dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Selanjutnya, tujuan strategis organisasi dijabarkan lebih lanjut dalam sasaran strategis.

Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai dalam periode jangka waktu tertentu, dan dirumuskan dalam bentuk tindakan dan alokasi sumber daya sehingga dapat diukur. Sasaran strategis merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis instansi pemerintah, sehingga sasaran merupakan cara untuk mencapai tujuan organisasi.

Tujuan dan Sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau yang telah ditetapkan dalam Dokumen Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029. Adapun tujuan strategis dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau adalah “Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah”.

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, maka dirumuskan sasaran strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau ;
2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah.
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Dokumen Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2026 ini merupakan dokumen perencanaan tahun pertama

dalam konteks perencanaan Tahun 2025 s.d 2029. Dalam upaya menjaga konsistensi pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana tersebut diatas, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau berkomitmen melaksanakan pengendalian intern yang dilakukan antara lain melalui perumusan kebijakan pengendalian dan pencegahan kecurangan (*fraud*) sehingga diharapkan seluruh target dan sasaran kinerja dapat dicapai lebih optimal.

Adapun tujuan dan sasaran Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2026 beserta indikatornya dapat dilihat pada tabel 3.1. berikut :

Tabel 3.1.
Rumusan Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2026

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	2025	2026
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH						
- Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif dan Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Kategori Hasil Pengukuran Indeks Pengelola Keuangan Daerah (Kategori)	B	B	A
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap LKPD Provinsi Riau (WTP) (Predikat)	WTP	WTP	WTP
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kategori Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Aset (IPA) (Kategori)	B	B	B
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	80,10	80,13	80,14

3.3 Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Arah Kebijakan Nasional Tahun 2026 yang tertuang dalam dokumen Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fisikal yaitu Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural;
- b. Pagu indikatif dalam RKPD;
- c. Hasil kesepakatan para pemangku kepentingan dalam Forum Perangkat Daerah BPKAD Provinsi Riau;
- d. Realisasi Capaian sampai dengan tahun berjalan;
- e. Target Renstra BPKAD Provinsi Riau sampai Tahun 2026;

Rencana Program dan Kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2026 adalah:

- 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 - 1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
 - 1.3.1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada PD
 - 1.4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.4.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 1.5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.5.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.5.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 1.5.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.5.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD
 - 1.5.6 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD
 - 1.6 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.6.1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- 1.7 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.7.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 1.7.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.7.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.8 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.8.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.8.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

2. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- 2.1 Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
 - 2.1.1 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
 - 2.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
 - 2.1.3 Koordinasi Penyusunan dan verifikasi RKA-SKPD
 - 2.1.4 Koordinasi penyusunan dan verifikasi DPA-SKPD
 - 2.1.5 Koordinasi, penyusunan dan verifikasi perubahan DPA-SKPD
 - 2.1.6 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
 - 2.1.7 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
 - 2.1.8 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
 - 2.1.9 Pembinaan Perencanaan Penganggaran daerah Pemerintah Provinsi
- 2.2 Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.2.1 Evaluasi Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota
 - 2.2.2 Evaluasi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota
 - 2.2.3 Evaluasi Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Peraturan Kepala Daerah

- tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
- 2.2.4 Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah
- 2.2.5 Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
- 2.2.6 Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasi Provinsi dan Kabupaten/kota dan Statistik Keuangan pemerintah Daerah
- 2.3 Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
 - 2.3.1 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
 - 2.3.2 Koordinasi dan penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
 - 2.3.3 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
 - 2.3.4 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
- 2.4 Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
 - 2.4.1 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendaptan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan beban
 - 2.4.2 Konsolidasi Laporan Keuangan PD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - 2.4.3 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi
 - 2.4.4 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan perbendahraan dan Tuntutan Kerugian Daerah
 - 2.4.5 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah

- 2.4.6 Penyelenggaraan Akuntansi Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi
- 2.5 Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 2.5.1 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
 - 2.5.2 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
 - 2.5.3 Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi
- 2.6 Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
 - 2.6.1 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
- 3. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
 - 3.1 Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - 3.1.1 Penyusunan Standar Harga
 - 3.1.2 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
 - 3.1.3 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik
 - 3.1.4 Inventarisasi Barang Milik Daerah
 - 3.1.5 Pengamanan Barang Milik Daerah
 - 3.1.6 Penilaian Barang Milik Daerah
 - 3.1.7 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - 3.1.8 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
 - 3.1.9 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
 - 3.1.10 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran BPKAD Provinsi Riau Tahun 2026, Dari 56 Sub Kegiatan pada Tahun 2026. Ada beberapa kegiatan yang mendukung Kebijakan Anti *Fraud* kepada ASN maupun Non ASN di Lingkup BPKAD Provinsi Riau yaitu Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan salah satu fokusnya kegiatan Sosialisasi Anti Kebijakan Fraud dan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan Fokus Kegiatan Cetak Baliho atau Banner Imbauan untuk Kebijakan Anti *Fraud*. Rincian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan BPKAD Provinsi Riau Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 pada Tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2026
dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Kode					RKPD Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2027	
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian	Kebutuhan Dana
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				1,444,238,142,232.42			1.967.283.273.016,00
5	02				KEUANGAN				1,444,238,142,232.42			1.967.283.273.016,00
5	02	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	30,827,606,446.00		100%	32.928.804.235,00
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terpenuhinya Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	0		3 Dokumen	130.000.000,00
5	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	0		3 Dokumen	130.000.000,00
5	02	001	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	27,942,619,367.00		100%	25.240.309.724,00
5	02	001	1.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	136 ASN	27,942,619,367.00		136 ASN	25.240.309.724,00
5	02	001	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terlaksananya Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 Laporan	7,461,185.00		2 Laporan	27.500.000
5	02	001	1.03	006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada PD	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	7,461,185.00		2 Laporan	27.500.000
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100%			100%	100.000.000,00
5	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0		1 Paket	100.000.000,00
5	02	001	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	717,907,770.00		100%	2.480.879.426,00
5	02	001	1.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25,808,800.00		1 Paket	42.142.426,00
5	02	001	1.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	224,083,235.00		1 Paket	755.000.000,00

Kode					RKPD Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2027	
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian	Kebutuhan Dana
5	02	001	1.05	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	96,852,000.00		1 Paket	289.988.000,00
5	02	001	1.06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	215,101,735.00		1 Paket	443.749.000,00
5	02	001	1.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	156,062,000.00		1 Laporan	775.000.000,00
5	02	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	0		2 Dokumen	175.000.000
5	02	001	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	24 Unit	50,400,000.00		24 Unit	548.000.000,00
5	02	001	1.07	010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	24 Unit	50,400,000.00		24 Unit	548.000.000,00
5	02	001	1.08		Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Meningkatnya Kinerja Aparatur	100%	1,626,458,124.00		100%	4.495.000.000,00
5	02	001	1.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	15,460,000.00		1 Laporan	30.000.000,00
5	02	001	1.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	849,998,978.00		1 Laporan	810.000.000,00
5	02	001	1.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	760,999,146.00		100%	3.655.000.000,00
5	02	001	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	482,760,000.00		100%	1.392.266.187,00

Kode					RKPD Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2027	
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian	Kebutuhan Dana
5	02	001	1.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	340,100,000.00		21 Unit	741.000.000,00
5	02	001	1.09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	65,410,000.00		50 Unit	194.800.000,00
5	02	001	1.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	77,250,000.00		3 Unit	456.466.187,00
5	02	002			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Persentase Keuangan Daerah Yang Dikelola	100%	1,412,399,159,786,.42		100%	1.602.554.590.668,00
5	02	002	1.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Penetapan KUA, PPAS, Perubahan KUA, Perubahan PPAS, Perda tentang APBD, PerKDH tentang Penjabaran APBD, Perda tentang Perubahan APBD, PerKDH tentang Perubahan Penjabaran APBD.	100%	2,298,472,400.00		100%	2.801.399.536,00
5	02	002	1.01	001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	4 Dokumen	87,012,000.00		4 Dokumen	125.914.238,00
5	02	02	1.001	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Jumlah dokumen perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	4 Dokumen	87,012,000.00		4 Dokumen	187.525.748,00
5	02	02	1.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	33 Dokumen	0		33 Dokumen	58.720.550,00
5	02	02	1.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	33 Dokumen	0		33 Dokumen	36.700.000,00
5	02	02	1.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	33 Dokumen	0		33 Dokumen	34.939.000,00

Kode					RKPD Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2027	
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian	Kebutuhan Dana
5	02	02	1.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	132 Dokumen	0		132 Dokumen	79.600.000,00
5	02	02	1.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	10 dokumen	674.234.400,00		10 dokumen	780.000.000,00
5	02	002	1.01	008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	10 Dokumen	951.264.000,00		10 Dokumen	945.000.000,00
5	02	002	1.01	009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	6 Dokumen	89,066,000.00		6 Dokumen	168.000.000,00
5	02	02	1.01	13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	220 Orang	409,884,000.00		220 Orang	385.000.000,00
5	02	002	1.02		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	100%	318,548,350.00		100%	968.000.000,00
5	02	002	1.02	002	Evaluasi Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	12 Laporan	138.350.000.00		12 Laporan	333.000.000,00

Kode					RKPD Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2027	
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian	Kebutuhan Dana
5	02	002	1.02	003	Evaluasi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	12 Laporan	134.450.000,00		12 Laporan	235.000.000,00
5	02	002	1.02	004	Evaluasi Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	12 Laporan	22.972.000,00		12 Laporan	105.000.000,00
5	02	02	1.02	06	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	3 Laporan	0		3 Laporan	75.000.000,00
5	02	002	1.02	010	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	12 Dokumen	22.776.350,00		12 Dokumen	115.000.000,00
5	02	02	1.02	12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/ Kota dan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	2 Dokumen	0		2 Dokumen	105.000.000,00
5	02	002	1.03		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Tertindakannya koordinasi Perbendaharaan daerah	100%	69.173.600,00		100%	902.106.350,00
5	02	002	1.03	001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 Dokumen	24.818.000,00		1 Dokumen	228.659.000,00

Kode					RKPD Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2027	
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian	Kebutuhan Dana
5	02	02	1.03	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	2 Laporan	4,800,000.00		2 Laporan	205.000.000,00
5	02	002	1.03	009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dokumen	12,045,600.00		12 Dokumen	153.447.350,00
5	02	02	1.03	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	27,510,000.00		1 Dokumen	165.000.000,00
5	02	02	1.03	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	80 Orang	0		80 Orang	150.000.000,00
5	02	002	1.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100%	190,009,944.00		100%	900.000.000,00
5	02	002	1.04	002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO, dan Beban	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	432 Dokumen	15,703,053.00		432 Dokumen	50.000.000,00
5	02	002	1.04	004	Konsolidasi Laporan Keuangan PD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	14 Laporan	38,988,356.00		14 Laporan	185.000.000,00
5	02	002	1.04	005	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Jumlah Ranperda dan ranpergub tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun	2 Dokumen	104,364,975.00		2 Dokumen	285.000.000,00

Kode					RKPD Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2027	
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian	Kebutuhan Dana
5	02	002	1.04	007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen	0		1 Dokumen	150.000.000,00
5	02	002	1.04	009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	23,141.260.00		1 Dokumen	105.000.000,00
5	02	002	1.04	011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	33 Orang	7,812.300.00		33 Orang	125.000.000,00
5	02	002	1.05		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase Alokasi dan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus	1 Laporan	1,409.520.205.492.42		1 Laporan	1.926.148.838.895,00
5	02	002	1.05	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Jumlah Laporan Penatausahaan dan EvaluasiTerlaksananya pembayaran Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota	1 Laporan	175.131.394,000.00		1 Laporan	209.855.000.000,00
5	02	002	1.05	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Jumlah Laporan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	20,000,000,000.00		1 Laporan	20.000.000.000,00
5	02	002	1.05	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	1 Laporan	1,214,388,811,492.42		1 Laporan	1.696.293.838.895,00
5	02	002	1.06		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		Terlaksananya Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	100%	2,750,000.00		100%	250.000.000,00

Kode					RKPD Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2027	
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian	Kebutuhan Dana
5	02	02	1,06	025	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	2,750,000.00		1 Dokumen	250.000.000,00
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	100%	827,376,000.00		100%	2.384.124.000,00
5	02	03	1,01		Pengelolaan Barang Milik Daerah		Terlaksanannya Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	827,376,000.00		100%	2.384.124.000,00
5	02	03	1,01	01	Penyusunan Standar Harga	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	171,316,000.00		1 Dokumen	277.116.000,00
5	02	03	1,01	03	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	48,600,000.00		2 Dokumen	125.000.000,00
5	02	03	1,01	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah,	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	2,100,000.00		1 Dokumen	195.000.000,00
5	02	03	1,01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	7 Laporan	27,588,000.00		7 Laporan	225.000.000,00
5	02	03	1,01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	493.415,000.00		1 Laporan	875.000.000,00
5	02	03	1,01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	224,987,000.00		1 Laporan	275.000.000,00
5	02	03	1,01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	0		1 Laporan	105.000.000,00

Kode					RKPD Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2027	
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian	Kebutuhan Dana
5	02	03	1,01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	0		2 Dokumen	102.008.000,00
5	02	03	1,01	11	Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 Laporan	23,070.000.00		2 Laporan	110.000.000,00
5	02	03	1,01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	7 Laporan	20,300.000.00		7 Laporan	95.000.000,00
TOTAL									1,444,238,142,232.42			1.967.283.273.016,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau yang bersifat teknis operasional, mengacu pada Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 – 2024 dan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024 dengan mempedomani regulasi – regulasi perencanaan yaitu Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 36 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2026, Pagu Indikatif Anggaran BPKAD Provinsi Riau adalah sebesar Rp. 1.444.238.142.232.42. yang terdiri dari 3 Program, 14 Kegiatan dan 41 Sub Kegiatan. Dengan mempedomani prosedur dan tahapan penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah, maka rumusan rencana kerja dan pendanaan yang terdiri atas Program, kegiatan, indikator dan target capaian serta Pagu indikatif Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2026, dirumuskan dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2026
dan Prakiraan Maju Tahun 2026 (Sistem Informasi Pemerintah Daerah)

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau.

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target	
					BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH								1,444,238,142,232.42				1.967.283.273.016,00		
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								1,444,238,142,232.42				1.967.283.273.016,00		
5	02				KEUANGAN								1,444,238,142,232.42				1.967.283.273.016,00		
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								30.827.606.446				32.943.913.624,00		
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								0				130.000.000,00		
5	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
						Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terpenuhinya penyusunan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran dan dokumen evaluasi kinerja	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	100 Persen	3 Dokumen	3 Dokumen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	130.000.000,00	
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								27,942,619,367.00				25.240.309.724,00		
5	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
						Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	100 Persen	136 Orang/ Bulan	100 Persen	27,942,619,367.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	136 Orang/ Bulan	25.240.309.724,00	
5	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								7,461,185.00				27.500.000,00		
5	02	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
						Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	100 Persen	2 Laporan	2 Laporan	7,461,185.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	27.500.000,00	
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								0				100.000.000,00		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
5	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
						Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Terlaksananya Disiplin ASN	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	100 Persen	1 Paket	100 Persen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	100.000.000,00	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									717,907,770.00					2.480.879.426,00
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
						Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	100 Persen	1 Paket	100 Persen	25,808,800.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	42.142.426,00	
5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
						Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	100 Persen	1 Paket	100 Persen	224,083,235.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	755.000.000,00	
5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
						Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	100 Persen	1 Paket	100 Persen	96,852,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	289.988.000,00	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
						Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	100 Persen	1 Paket	100 Persen	215,101,735.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	443.749.000,00	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
						Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	100 Persen	1 Laporan	100 Persen	156,062,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	775.000.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD													
					Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	100 Persen	2 Dokumen	100 Persen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	175.000.000,00	
5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								50,400,000.00					548.000.000,00
5	02	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
					Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	100 Persen	55 Unit	55 Unit	50,400,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	55 Unit	548.000.000,00	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,626,458,124.00					4.495.000.000,00
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
					Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya Kinerja Aparatur	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	100 Persen	1 Laporan	100 Persen	15,460,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	30.000.000,00	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
					Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Meningkatnya Kinerja Aparatur	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	100 Persen	1 Laporan	100 Persen	849,998,978.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	810.000.000,00	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
					Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Meningkatnya Kinerja Aparatur	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	100 Persen	1 Laporan	100 Persen	760,999,146.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.655.000.000,00	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								482,760,000.00					1.392.266.187,00
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	100 Persen	25 Unit	100 Persen	340,100,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	741.000.000,00
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	100 Persen	50 Unit	100 Persen	65,410,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	194.800.000,00
5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
						Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	100 Persen	2 Unit	100 Persen	77,250,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	456.466.187,00
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH								1,412,399,159,786,.42					1.602.439.590.668,00
5	02	02	1.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah								2,298,472,400.00					2.801.399.536,00
5	02	02	1.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS													
						Persentase Keuangan Daerah Yang Dikelola	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Penetapan KUA, PPAS, Perubahan KUA, Perubahan PPAS, Perda tentang APBD, PerKDH tentang Penjabaran APBD, Perda tentang Perubahan APBD, PerKDH tentang Perubahan Penjabaran APBD.	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	100 Persen	12 Dokumen	100 Persen	87,012,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	12 Dokumen	125.914.238,00
5	02	02	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase Keuangan Daerah Yang Dikelola	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Penetapan KUA, PPAS, Perubahan KUA, Perubahan PPAS, Perda tentang APBD, PerKDH tentang Penjabaran APBD, Perda tentang Perubahan APBD, PerKDH tentang Perubahan Penjabaran APBD.	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	100 Persen	2 Dokumen	100 Persen	87,012,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	187.525.748,00
5	02	02	1.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD													
						Persentase Keuangan Daerah Yang Dikelola	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Penetapan KUA, PPAS, Perubahan KUA, Perubahan PPAS, Perda tentang APBD, PerKDH tentang Penjabaran APBD, Perda tentang Perubahan APBD, PerKDH tentang Perubahan Penjabaran APBD.	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	100 Persen	22 Dokumen	100 Persen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	22 Dokumen	58.720.550,00
5	02	02	1.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD													
						Persentase Keuangan Daerah Yang Dikelola	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Penetapan KUA, PPAS, Perubahan KUA, Perubahan PPAS, Perda tentang APBD, PerKDH tentang Penjabaran APBD, Perda tentang Perubahan APBD, PerKDH tentang Perubahan Penjabaran APBD.	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	100 Persen	22 Dokumen	100 Persen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	22 Dokumen	36.700.000,00
5	02	02	1.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase Keuangan Daerah Yang Dikelola	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	Penetapan KUA, PPAS, Perubahan KUA, Perubahan PPAS, Perda tentang APBD, PerKDH tentang Penjabaran APBD, Perda tentang Perubahan APBD, PerKDH tentang Perubahan Penjabaran APBD.	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	100 Persen	22 Dokumen	100 Persen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	22 Dokumen	34.939.000,00
5	02	02	1.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD													
						Persentase Keuangan Daerah Yang Dikelola	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Penetapan KUA, PPAS, Perubahan KUA, Perubahan PPAS, Perda tentang APBD, PerKDH tentang Penjabaran APBD, Perda tentang Perubahan APBD, PerKDH tentang Perubahan Penjabaran APBD.	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	100 Persen	22 Dokumen	100 Persen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	22 Dokumen	79.600.000,00
5	02	02	1.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD													
						Persentase Keuangan Daerah Yang Dikelola	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Penetapan KUA, PPAS, Perubahan KUA, Perubahan PPAS, Perda tentang APBD, PerKDH tentang Penjabaran APBD, Perda tentang Perubahan APBD, PerKDH tentang Perubahan Penjabaran APBD.	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	100 Persen	10 Dokumen	100 Persen	674,234,400.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	10 Dokumen	780.000.000,00
5	02	02	1.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase Keuangan Daerah Yang Dikelola	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Penetapan KUA, PPAS, Perubahan KUA, Perubahan PPAS, Perda tentang APBD, PerKDH tentang Penjabaran APBD, Perda tentang Perubahan APBD, PerKDH tentang Perubahan Penjabaran APBD.	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	100 Persen	10 Dokumen	100 Persen	951,264,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	10 Dokumen	945.000.000,00
5	02	02	1.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran													
						Persentase Keuangan Daerah Yang Dikelola	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Penetapan KUA, PPAS, Perubahan KUA, Perubahan PPAS, Perda tentang APBD, PerKDH tentang Penjabaran APBD, Perda tentang Perubahan APBD, PerKDH tentang Perubahan Penjabaran APBD.	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	100 Persen	2 Dokumen	100 Persen	89,066,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	168.000.000,00
5	02	02	1.01	0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi													
						Persentase Keuangan Daerah Yang Dikelola	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Penetapan KUA, PPAS, Perubahan KUA, Perubahan PPAS, Perda tentang APBD, PerKDH tentang Penjabaran APBD, Perda tentang Perubahan APBD, PerKDH tentang Perubahan Penjabaran APBD.	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	100 Persen	220 Orang	100 Persen	409,884,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	220 Orang	385.000.000,00
5	02	02	1.02		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota								318,548,350.00					853.000.000,00
5	02	02	1.02	0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase Keuangan Daerah Yang Dikelola	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	138.350.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	12 Laporan	333.000.000,00
5	02	02	1.02	0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota													
						Persentase Keuangan Daerah Yang Dikelola	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	134.450.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	12 Laporan	235.000.000,00
5	02	02	1.02	0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota													
						Persentase Keuangan Daerah Yang Dikelola	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	22.972.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	12 Laporan	105.000.000,00
5	02	02	1.02	0006	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah													
						Persentase Keuangan Daerah Yang Dikelola	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	100 Persen	1 Laporan	100 Persen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	1 Laporan	75.000.000,00
5	02	02	1.02	0010	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase Keuangan Daerah Yang Dikelola	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	100 Persen	12 Dokumen	100 Persen	22,776,350.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	12 Dokumen	0,00
5	02	02	1.02	0012	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah													
						Persentase Keuangan Daerah Yang Dikelola	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	105.000.000,00
5	02	02	1.03		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah								69,173,600.00					902.106.350,00
5	02	02	1.03	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah													
						Persentase Keuangan Daerah Yang Dikelola	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Terlaksananya koordinasi Perbendaharaan daerah	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	24,818,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 Dokumen	228.659.000,00
5	02	02	1.03	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase Keuangan Daerah Yang Dikelola	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Terlaksananya koordinasi Perbendaharaan daerah	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	100 Persen	1 Laporan	100 Persen	4,800,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	1 Laporan	205.000.000,00
5	02	02	1.03	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait													
						Persentase Keuangan Daerah Yang Dikelola	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Terlaksananya koordinasi Perbendaharaan daerah	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	100 Persen	12 Dokumen	100 Persen	12,045,600.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dokumen	153.447.350,00
5	02	02	1.03	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan													
						Persentase Keuangan Daerah Yang Dikelola	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Terlaksananya koordinasi Perbendaharaan daerah	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	27,510,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	165.000.000,00
5	02	02	1.03	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota													
						Persentase Keuangan Daerah Yang Dikelola	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi Perbendaharaan daerah	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	100 Persen	80 Orang	100 Persen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	80 Orang	150.000.000,00
5	02	02	1.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah							190,009,944.00					900.000.000,00	
5	02	02	1.04	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase Keuangan Daerah Yang Dikelola	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	15,703,053.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	1 Dokumen	50.000.000,00
5	02	02	1.04	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah													
						Persentase Keuangan Daerah Yang Dikelola	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	100 Persen	14 Laporan	100 Persen	38,988,356.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	14 Laporan	185.000.000,00
5	02	02	1.04	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi													
						Persentase Keuangan Daerah Yang Dikelola	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	100 Persen	2 Dokumen	100 Persen	104,364,975.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	2 Dokumen	285.000.000,00
5	02	02	1.04	0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah													
						Persentase Keuangan Daerah Yang Dikelola	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen	150.000.000,00
5	02	02	1.04	0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah													
						Persentase Keuangan Daerah Yang Dikelola	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	23,141,260.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	105.000.000,00
5	02	02	1.04	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase Keuangan Daerah Yang Dikelola	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	100 Persen	33 Orang	100 Persen	7,812,300.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	33 Orang	125.000.000,00
5	02	02	1.05		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah								1,409,520,205,492.42					1.926.148.838.895,00
5	02	02	1.05	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan													
					Persentase Keuangan Daerah Yang Dikelola	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Persentase Alokasi dan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	100 Persen	1 Laporan	100 Persen	175.131.394,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	209.855.000.000,00	
5	02	02	1.05	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak													
					Persentase Keuangan Daerah Yang Dikelola	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase Alokasi dan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	100 Persen	1 Laporan	100 Persen	20,000,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	20.000.000.000,00	
5	02	02	1.05	0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi													
					Persentase Keuangan Daerah Yang Dikelola	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Persentase Alokasi dan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	100 Persen	1 Laporan	100 Persen	1,214,388,811,492.42	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	1 Laporan	1.696.293.838.895,00	
5	02	02	1.06		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah								2,750,000.00					250.000.000,00
5	02	02	1.06	0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah													
					Persentase Keuangan Daerah Yang Dikelola	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	2,750,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	250.000.000,00	
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH								827,376,000.00					2.384.124.000,00
5	02	03	1.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah								827,376,000.00					2.384.124.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
5	02	03	1.01	0001	Penyusunan Standar Harga														
					Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Terlaksanannya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	171,316,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	277.116.000,00		
5	02	03	1.01	0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah														
					Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Terlaksanannya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	100 Persen	2 Dokumen	100 Persen	48,600,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	125.000.000,00		
5	02	03	1.01	0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah														
					Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksanannya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	2,100,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	195.000.000,00		
5	02	03	1.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah														
					Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Terlaksanannya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	100 Persen	7 Laporan	100 Persen	27,588,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	7 Laporan	225.000.000,00		
5	02	03	1.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah														
					Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Terlaksanannya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	100 Persen	1 Laporan	100 Persen	493.415,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	875.000.000,00		
5	02	03	1.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah														
					Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Terlaksanannya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	100 Persen	1 Laporan	100 Persen	224,987,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	275.000.000,00		
5	02	03	1.01	0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah														

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksanannya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	100 Persen	1 Laporan	100 Persen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	105.000.000,00
5	02	03	1.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah													
						Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terlaksanannya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	100 Persen	2 Dokumen	100 Persen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	102.008.000,00
5	02	03	1.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah													
						Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Terlaksanannya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	100 Persen	2 Laporan	100 Persen	23,070.000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 Laporan	110.000.000,00
5	02	03	1.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah													
						Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Terlaksanannya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	100 Persen	7 Laporan	100 Persen	20,300.000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	7 Laporan	95.000.000,00
TOTAL													1,444,238,142,232.42					1.967.283.273.016,00

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2026 ini merupakan Rencana Kerja Tahunan berdasarkan Renstra 2025 – 2029 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi daerah serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2026.

Dengan adanya Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2026, maka penetapan Prioritas Pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi sesuai dengan ketersediaan Anggaran pada tahun berjalan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Riau maupun dengan instansi terkait lainnya.

Dengan disusunnya Dokumen Renja ini diharapkan pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2026 dapat berjalan secara lebih terarah dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah Provinsi Riau serta tujuan dan sasaran strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau sebagaimana tertuang dalam RPD Provinsi Riau Tahun 2025 - 2029 dan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau tahun 2025 – 2029.

Dokumen ini akan menjadi acuan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh pejabat dan aparatur di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dengan harapan dapat meningkatkan kapasitas dan Kinerja Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.

Pekanbaru, 28 November 2025

**PIH. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH PROVINSI RIAU**



ISPAN S. SYAHPUTRA, HS, MM

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19720911 200604 1 003



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Cut Nyak Dien II/2 Telp./Fax. (0761) 33266
PEKANBARU

Kode Pos : 28126

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU

Nomor : **Kpts.** 15 / 11 / 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) MURNI dan RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2026 PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

- Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya efektifitas dan optimalisasi perencanaan pembangunan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau sesuai arah kebijakan dan visi misi Kepala Daerah maka perlu disusun Rencana Kerja (RENJA) Murni dan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Murni dan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 5);
12. Peraturan Gubernur Riau Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 24).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Murni dan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2026 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Murni dan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2026 pada Badan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah Provinsi Riau sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Surat Keputusan ini.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Murni dan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2026 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal : 03 Februari 2025

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU



INDRA, S.E., M.Si., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19721115 199803 1 004

Lampiran I : Keputusan Kepala Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah
Nomor : Kpts. 15 / 11 / 2025
Tanggal : 03 Februari 2025

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) MURNI DAN
RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2026
PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU**

No	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1	Penanggungjawab	: Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau
2	Ketua	: Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau
3	Sekretaris	: Ketua Tim Subtansi Perencanaan dan Program Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau
4	Koordinator Bidang Anggaran	: Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau
	Anggota	: 1. Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran 2. Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pengendalian Anggaran 3. Ketua Tim Subtansi Fasilitasi dan Pembinaan Anggaran 4. Nina Hartiningsih 5. Deny Handy Sugiantoro
5	Koordinator Bidang Akuntansi dan Pelaporan	: Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau
	Anggota	: 1. Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Konsolidasi 2. Kepala Sub Bidang Analisa Data dan Pelaporan 3. Ketua Tim Subtansi Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan 4. Zia Lansam Muda 5. Reza Noverly Azhara
6	Koordinator Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	: Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau
	Anggota	: 1. Kepala Sub Bidang Penerimaan Daerah 2. Kepala Sub Bidang Belanja Daerah 3. Ketua Tim Subtansi Pengelolaan Kas Daerah 4. Andri Syam Putra 5. Irwan Saputra

- 7 Koordinator Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah : Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau
- Anggota :
1. Kepala Sub Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah
 2. Kepala Sub Bidang Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah
 3. Ketua Tim Subtansi Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Daerah
 4. Gillang Lesmana
 5. Avishal Hazmi Meifriyan
- 8 Sekretariat :
- Koordinator Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau
- Anggota
1. Benni Yulison
 2. Reza Kurniawan
 3. M. Al Amin Amlas

KEPALA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN
DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU



INDRA, S.E., M.Si., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19721115 199803 1 004

**TUGAS TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) MURNI DAN
RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2026
PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU**

Tim Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Murni dan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun Tahun 2026 memiliki tugas :

1. Mempelajari Visi, Misi, Strategi dan Kebijakan Umum Pembangunan Daerah;
2. Mengkaji seluruh peraturan, pedoman dan petunjuk serta dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Murni dan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau;
3. Koordinator dan Anggota Bidang memiliki tugas :
 - a. Menghimpun bahan dan data sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing untuk penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Murni dan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau;
 - b. Melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau;
 - c. Melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran; dan
 - d. Mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai target indikator periode lalu.
4. Sekretariat memiliki tugas :
 - a. Melakukan kordinasi dan konsultasi penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Murni dan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dengan pimpinan;
 - b. Melakukan diskusi untuk memperoleh masukan data yang diperlukan antarbidang sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Murni dan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau;
 - c. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang terkait dalam proses penyusunan agar sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 2025-2026; dan
 - d. Mendokumentasikan hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Murni dan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2026.
5. Menyusun Rencana Kerja (RENJA) Murni dan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2026.

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU



INDRA, S.E., M.Si., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19721115 199803 1 004

**Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan
Renja Perangkat Daerah
Provinsi Riau**

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian			
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah provinsi dan Agenda Kerja Perangkat Daerah provinsi.	√			
2.	Pengolahan data dan informasi.	√			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah	√			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah provinsi tahun lalu berdasarkan Renstra-Perangkat Daerah provinsi.	√			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi.	√			
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD provinsi.	√			
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.	√			
8.	Penelaahan usulan masyarakat.	√			
9.	Perumusan kegiatan prioritas.	√			
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah provinsi.	√			
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kabupaten/kota.	√			
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi.	√			
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah provinsi dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	√			
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah provinsi sesuai surat edaran Gubernur.	√			
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	√			
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah provinsi.	√			
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah provinsi telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	√			
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah provinsi yang telah disahkan.	√			

**PII. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH PROVINSI RIAU**



ISPAN S. SYANPUTRA, HS. MM

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19720911 200604 1 003

**FORM VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA –PD)
PROVINSI RIAU TAHUN 2026**

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	BAB/SUBBAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
			SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1.	BAB I	PENDAHULUAN			
	1.1. Latar Belakang	Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD	V		
	1.2 Dasar Hukum	Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.		V	Agar dihapus landasan hukum no. 1, 2, 3,7,8. Koreksi kembali penulisan tahun pada no.21 dan 22.
	1.3 Maksud dan Tujuan	Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.	V		
	1.4 Sistematika Penulisan	Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.		V	Agar disesuaikan seperti yang tersusun pada matriks verifikasi dan bab II Hasil evaluasi Renja adalah untuk tahun 2024 bukan tahun 2023.
2.	BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		V	Judul Bab II agar ditambahkan tahun 2024
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun	Berisikan uraian mengenai : 1. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 2. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah	V	V	- Judul Sub bab 2.1 agar diperbaiki (tahun 2024 dicantumkan)sesuai dengan matriks. - Pada halaman 11 baris terakhir agar diperbaiki pengulangan kata tertinggi.

NO	BAB/SUBBAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
	2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 3. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;	V		
		4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan; 5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; 6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut; dan 7. Sajikan Tabel T-C.29	V V V	V	Tabel 2.2 (T-C.29) agar dipindahkan ke bagian akhir Subbab 2.1
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	1. Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK; 2. Sajikan Tabel T-C.30	V	V	Agar dilengkapi sesuai dengan lampiran Permendagri No. 86 tahun 2017.
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Berisikan uraian mengenai : 1. Tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD; 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD; 3. Dampaknya terhadap pencapaian tujuan dan sasaran daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (<i>Sustainable Development Goals</i>); 4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD; dan 5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas tahun yang direncanakan	V V V V		

NO	BAB/SUBBAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
	2.4 Review RKPDP	Berisikan uraian mengenai : 1. Yaitu membandingkan antara RKPDP dengan hasil analisis kebutuhan;	V		
		2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;	V		
		3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan RKPDP, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat didalam RKPDP, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda; dan	V		
		4. Sajikan Tabel T-C.31	V		
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Masyarakat	Berisikan uraian mengenai : 1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan/sub kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;	V		
		2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;	V		
		3. Sajikan Tabel T-C.32	V		
3	BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH			
	3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	Berisikan uraian mengenai : Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	V		
	3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	Berisikan uraian mengenai : 1. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah;	V		
		2. Target Indikator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah pada Renja berdasarkan Renstra Perangkat Daerah.	V		
	3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Berisikan uraian mengenai : 1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan;	V		
		2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan;	V		

NO	BAB/SUBBAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
		3. Penjelasan jika rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak sesuai dengan RKPD, baik jenis program, kegiatan dan sub kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya dan 4. Sajikan Tabel T-C.33	V		
4	BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH			
		Berisikan uraian mengenai : Hasil inputan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan pada SIPD RI sesuaikan target indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan dengan RKPD	V		
5	BAB V	PENUTUP			
		Berisikan uraian mengenai : 1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; 2. Kaidah-kaidah pelaksanaan; 3. Rencana tindak lanjut; 4. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.	V		Lengkapi Tanda Tangan dan Cap Kepala Perangkat Daerah
6	LAMPIRAN	1. SK Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 2. Tabel E.29	V	V	Belum tersedia, agar dilengkapi

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU


ISPAN SYAHPUTRA, HS, MM
NIP. 19720911 200604 1 003

Pekanbaru, 2 November 2025

Mengetahui,
Kepala Bidang Perencanaan dan SDA
Bappeda Provinsi Riau


ABDUL MADIAN
NIP. 19750518 200212 1 006

Verifikator :

1. ARIFAH AYUS, SP
NIP. 19721215 200701 2 003

2. HARIYANTI, S.Pi, M.Si
NIP. 19741228 200112 2 002






PEMERINTAH PROVINSI RIAU
INSPEKTORAT DAERAH

JL. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 22300 FAX (0761) 23256

PEKANBARU

CATATAN HASIL REVIU
RANCANGAN AKHIR RENJA-PD
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI RIAU
TAHUN 2026



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
INSPEKTORAT DAERAH

JL. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 22300 FAX. (0761) 23256
email : inspektorat@riau.go.id website : inspektorat.riau.go.id

PEKANBARU

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU	Disusun oleh	Melly Oktavianti, SE
	Tanggal	01 Desember 2025
	Direviu oleh	Aulia Osna R, SH, MH
	Tanggal	01 Desember 2025
	Disetujui oleh	Roni Cokro S, SE, M.Si
	Tanggal	01 Desember 2025

CATATAN HASIL REVIU

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-PD)
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2026**

Uraian Catatan Hasil Reviu	No Indeks KKR
A. Pengujian Atas Kelengkapan Dokumen Pendukung Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)	KKR 01
Penyusunan dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2026 telah sepenuhnya didukung dengan dokumen pendukung yang memadai.	
B. Pengujian atas Kesesuaian Sistematika Penulisan dan Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)	KKR 02
Penyajian sistematika penulisan dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2026 telah sepenuhnya mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Surat Plt. Kepala Bappeda Provinsi Riau Nomor 000.7/136/BAPPEDA-BIDANG I/2025 tanggal 29 Oktober 2025.	
C. Pengujian Atas Kesesuaian Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dengan RKPD	KKR 03
Rumusan tujuan dan sasaran dalam dokumen Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2026 pada Bab III belum sepenuhnya selaras dengan rumusan tujuan dan sasaran pada Bab IV Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, dimana masih terdapat rumusan sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada RKPD Tahun 2026 yang belum disajikan	

Catatan Hasil Reviu Renja-Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2026

dalam dokumen Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2026.	
D. Pengujian Atas Penyusunan Subtansi Antar Bab Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) meliputi :	
1. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan pada BAB III Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Didasarkan pada Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah pada BAB II Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)	KKR 04.a
Penetapan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2026 telah selaras dan didasari atas isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau.	
2. Indikator Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan Mendukung Indikator Kinerja Program dalam Renstra-PD dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)	KKR 04.b
Penetapan indikator kinerja kegiatan dan sub kegiatan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2026 telah selaras dan mendukung indikator kinerja program dalam Renstra-PD dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2026.	
3. Keselarasan Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan antara Renstra-PD, RKPD dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)	KKR 04.c
Penyajian rumusan indikator program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2026 belum selaras dengan Renstra-PD dan RKPD Tahun 2026.	
4. Keselarasan Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang terdapat dalam Renstra-PD, RKPD dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)	KKR 04.d
Penyajian rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2026 telah selaras dengan Renstra-PD dan RKPD Tahun 2026.	

5. Keselarasan Pagu Renstra-PD, RKPD 2026 dengan Pagu Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)	KKR 04.e
Penyajian pagu program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2026 telah diselaraskan dengan pagu RKPD Tahun 2026.	
6. Keselarasan Indikator Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Renstra-PD dengan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)	KKR 04.f
Penyajian indikator target program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2026 telah mempedomani indikator target pada Renstra-PD.	
HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN	
SARAN	
Berdasarkan hasil reviu Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2026, kami memberikan saran kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau melalui Tim Penyusun Rancangan Akhir Renja-PD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2026 agar:	
1. Melakukan koordinasi dengan Bappeda Provinsi Riau untuk mendapatkan dokumen pendukung dalam melaksanakan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2026.	
2. Melakukan penyesuaian/penyempurnaan penyajian pada Bab II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2026 dengan menggunakan data hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2024 dari Bappeda Provinsi Riau.	
3. Melakukan penyesuaian/penyempurnaan penyajian pada rumusan tujuan dan sasaran dan rumusan indikator kinerja tujuan dan sasaran pada Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2026 sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2026.	

4. Memperhatikan penyajian indikator target program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renstra-PD.

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU,  ISPAN S SYAHPUTRA HS, MM NIP. 19720911 200604 1 003	Pekanbaru, 01 Desember 2025 PENGENDALI MUTU,  Drs. ARMANSYAH NIP. 19631231 198303 1 309
---	--

